



PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik



AKMAL DAN ISRAN SALING PUJI KINERJA

BACA HALAMAN 2-3



**PENGETAP BBM
DITANGKAP, JUAL
BENSIN BERSIBSIDI
KE POM MINI
BACA HALAMAN 27**



ISTIMEWA

Serah terima Pj Gubernur kepada Akmal Malik.

Akmal dan Isran Saling Puji Kinerja

SAMARINDA - Akmal Malik resmi menjadi Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kalim). Ia juga mengapresiasi kinerja pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

"Saya merasa sangat berbahagia berhadapan dengan masyarakat Kaltim yang ramah dan baik hati. Kepemimpinan Isran-Hadi sudah

menggambarkan dengan sangat tepat sekali bagaimana rakyat Kaltim, dikenal selalu bersemangat dalam mencapai tujuan yang baik," ungkap Akmal Malik usai serah terima jabatan Pj Gubernur Kaltim di Plenary Hall Sempaja Samarinda, Rabu (4/10/2023).

Akmal juga menyebutkan bahwa rakyat Kaltim memiliki falsafah hidup dari Bahasa Banjar yang pantang menyerah dalam mencapai cita-cita,

sebagaimana pesan dari Pangeran Antasari "Waja Sampai Kapurung".

Dikemukakannya, apresiasi kepada DPRD Kaltim, Bupati, Wali kota, dan ASN yang telah mendukung kinerja pemerintah provinsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Apabila kita melihat gambaran capaian kinerja makro ekonomi di Kaltim, ada beberapa hal yang patut kita banggakan bersama," ujarnya.

Kemudian, meski di tengah pandemi yang cukup keras melanda Indonesia bahkan dunia, Kaltim menunjukkan performa yang sangat positif, jauh lebih baik dari pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Ia juga menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kaltim naik sebesar 4,4 persen, sementara nasional hanya 2,1 persen.

Menurut Akmal, di bawah kepemimpinan Isran-Hadi sangat fokus terhadap meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia. Terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kaltim sejak tahun 2018 pada lima tahun terakhir selalu ada peningkatan yang cukup signifikan, bahkan poin IPM Kaltim lebih tinggi dari standar nasional.

Sedangkan, kemiskinan di Kaltim turun dalam lima tahun terakhir dan menunjukkan tren yang positif. Kendati demikian, Akmal mengingatkan bahwa tingkat kemiskinan masih perlu diapresiasi karena tingkat prestasinya masih di bawah angka nasional.

"Tingkat pengangguran terbuka data yang ditampilkan dapat disimpulkan bahwa masalah penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas yang sama-sama diselesaikan oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kaltim," bebernya.

Adanya kesenjangan atau ketimpangan pendapatan, ia melihat proses ketimpangan pendapatan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi, menurutnya kesenjangan pembangunan di Kaltim semakin kecil tiap tahunnya.

Akmal Malik juga mengapresiasi upaya Pemprov Kaltim dalam mengendalikan inflasi, yang menjadi perhatian presiden. Inflasi di Kaltim memiliki kecenderungan tidak jauh berbeda dengan tren inflasi nasional dan berada pada level yang terkendali rendah.

"Kami percaya terkendalinya inflasi tak terlepas dari peran yang dilakukan Isran-Hadi yang setiap hari terus memantau perkembangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut, berada di jajaran pemerintah provinsi yang berprestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sistem informasi LPPD. Kaltim memiliki kinerja yang luar biasa dalam pelayanan dasar,

terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman.

"Semoga setelah Sertijab, kita dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kaltim dan memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.

ISRAN TITIP PESAN UNTUK TAK HAPUS HONORER

Isran Noor menitipkan pesan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik pada gelaran Serah Terima Jabatan Gubernur Kaltim, Rabu (4/10/2023). Ia menyampaikan untuk tidak menghapus tenaga honorer di Kaltim.

Isu penghapusan tenaga honorer memang menjadi fokus Isran untuk diperjuangkan. Ia bahkan menginisiasi pembahasan penghapusan tenaga honorer bersama Menpan-RB beberapa waktu lalu.

"Yakin kalian tidak akan dihapus. Kalau ada yang niat hapus baik honorer dan PPPK hati-hati, busung," ucapnya saat menyampaikan sambutan. "Saya bersumpah walau tidak ada kewenangan lagi, tidak ada honorer yang dihapus. Setuju?" sambungnya.

Isran mengatakan bahwa alasan mempertahankan tenaga non-ASN mengingat jumlah honorer yang cukup besar di Indonesia mencapai 4 juta orang. Bila harus dihapus akan ada implikasi ekonomi yang akan terjadi. Bila perlu sebut Isran, honorer yang mempunyai kapabilitas diangkat menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

"Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK), sama aja kalau nggak diangkat kecelakaan," ucapnya.

Ia turut menyampaikan kepada Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, untuk bersikap arif kepada jajaran Pemprov Kaltim. Terhusus kepada jabatan struktural di Organisasi Perangkat Daerah.

"Ada yang jadi Pj Gubernur, dia ganti sekdanya. Padahal jabatan struktural itu tidak ada kaitannya dengan politik. Bukan bermaksud menasehati, saya yakin (Akmal Malik) bagus dan sangat bijaksana," tandasnya. (eky/nita)





PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From **Rp15.000** nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Terung



Pisang Goreng Kaya



Teh Tarik Spirit

BEBAS PILIH MENU !

*syarat dan ketentuan berlaku

www.hotelgrandkartika.com/inspirasi



RAKORNAS P2DD: Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menghadiri Rakornas P2DD Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (3/10).

Gubernur Hadiri Rakornas P2DD Tahun 2023

JAKARTA - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) tahun 2023 dihadiri Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum. Acara tersebut digelar di Gedung Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa (3/10).

Rakornas P2DD ini diikuti oleh Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia dan mengambil tema "Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah Untuk Indonesia Maju."

Kegiatan tersebut dihadiri Menko Perekonomian sekaligus Ketua Pengarah Satgas P2DD, Airlangga Hartarto, Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Mendagri, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri PPN/

Bappenas, Suharso Monoarfa, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.

Secara daring, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), K.H. Ma'ruf Amin, dalam Rakornas P2DD 2023, memberikan sejumlah arahan strategis untuk mengakselerasi digitalisasi transaksi Pemda dan mendukung akuntabilitas keuangan daerah.

Pertama, mendorong Pemda untuk menetapkan regulasi pendukung pasca penetapan UU 1/2022 dan regulasi terkait penguatan P2DD;

Kedua, mendorong Inovasi dan Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah;

Ketiga, mengoptimalisasi Peman-

faatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Satelit Satria untuk mendukung peningkatan jaringan;

Keempat, memperkuat Ekosistem Digital Bank Pembangunan Daerah dalam mendorong digitalisasi transaksi Pemda;

Kelima, memperkuat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan transaksi Pemda.

Arahan Wakil Presiden RI tersebut akan menjadi bahasan tindak lanjut dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) dalam tahapan P2DD berikutnya.

Sebagai informasi, Rakornas P2DD merupakan forum tertinggi antara pimpinan Kementerian/Lembaga anggota Satgas P2DD dan seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TP2DD untuk sinkronisasi kebijakan strategis di level pusat dan daerah. (dkisp)



SILATURAHMI: Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum bersilaturahmi bersama Purnawirawan TNI/Polri dan Warakwuri di Tarakan, Rabu (4/10).

Gubernur Bersilaturahmi dengan Purnawirawan TNI/Polri Dan Warakawuri

TARAKAN - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum disambut dengan hangat saat menghadiri silaturahmi bersama Purnawirawan TNI/Polri dan Warakawuri se-Kota Tarakan pada hari Rabu (4/10) di Hotel Royal Kota Tarakan.

Gubernur Zainal Paliwang menyampaikan rasa haru dan terimakasih kepada keluarga Purnawirawan TNI/Polri dan Warakawuri yang telah menyempatkan hadir pada momen silaturahmi kali ini.

Tak hanya itu, Gubernur juga berharap silaturahmi kali ini bukan yang pertama dan terakhir karena keluarga besar Purnawirawan juga memili-

ki andil dalam proses pembangunan di Kaltara.

"Tentu selayaknya keluarga, jangan pernah memutus silaturahmi diantara keluarga besar TNI/Polri," kata Gubernur Zainal saat menyampaikan sambutannya.

Gubernur juga ingin seluruh lapisan masyarakat khususnya Purnawirawan TNI/Polri turut berpartisipasi dalam memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Agar pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur dapat tercapai dengan maksimal serta tepat sasaran.

"Dukungan dari seluruh lapisan masyarakat tentu sangat kami bu-

tuhkan karena suksesnya suatu pembangunan tidak mungkin tercapai bila hanya berpusat pada Pemprov semata," ujarnya.

Akhirnya Gubernur berpesan agar keluarga besar Purnawirawan TNI/Polri beserta Warakawuri tetap kompak dimanapun berada.

"Jaga silaturahmi, dimanapun berada TNI/Polri tetap NKRI Harga Mati," tuntasnya.

Dalam kesempatan ini Zainal Paliwang juga memberikan bantuan berupa sembako kepada Purnawirawan TNI/Polri dan Warakawuri sebagai bentuk penghormatan atas bakti jasanya selama bertugas. **(dkisp)**



RAFI'I/MEDIA KALTIM

Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Baharuddin.

Komisi IV DPRD Kukar Dorong Pengadaan Kendaraan Damkar

TENGGARONG-Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), mendorong pemenuhan alat penanganan kebakaran ditingkatkan. Terutama di kecamatan-kecamatan yang belum dipenuhi sarana mobil pemadam kebakaran (damkar).

Ketersediaan mobil damkar yang ada saat ini, pun jauh dari kata ideal. Melihat bentuk geografis wilayah Kukar yang begitu luas, maka masalah musibah kebakaran di kecamatan-kecamatan yang jaraknya jauh dari Tenggarong harus ditangani dengan baik.

"DPRD Kukar dalam hal ini mendorong agar pemerintah daerah memberikan perhatian serius untuk pengadaan unit mobil damkar di se-

tiap kecamatan," jelas Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Baharuddin.

Selain mobil damkar di Kecamatan, perlu juga pengadaan kendaraan viar dan mesin pompa air portabel untuk menangani kebakaran di daerah padat penduduk yang memiliki jalan berukuran kecil seperti gang, sehingga sulit dimasuki mobil damkar yang berukuran besar.

Jika diperlukan, setiap dusun di wilayah desa memiliki kendaraan viar beserta peralatan pemadam kebakaran. Dengan perlengkapan yang memadai mereka bisa menjadi antisipasi awal terjadinya musibah kebakaran.

"Kita menekankan agar peralatan itu bisa disediakan minimal di mas-

ing-masing desa," ujarnya.

Baharuddin menambahkan, pengadaan tersebut juga telah dibahas pada penganggaran APBD perubahan 2023. Ia memastikan ada sebagian unit damkar dan perlatan damkar yang telah dianggarkan.

Komisi IV DPRD Kukar pun komitmen bakal terus mendorong agar pengadaan unit mobil damkar dan peralatan dapat tercover kembali di tahun 2024 mendatang.

"Kita pastikan alokasi anggarannya di perubahan ini terealisasi, dan sisanya kita anggarakan di murini 2024," pungkasnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Gelaran Kukar Bersholawat Jilid 1 yang dilaksanakan pada Road To Erau 2023.

Peringati Maulid Nabi Muhammad, Pemkab Kukar Gelar Kukar Bersholawat Jilid 2

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), kini tengah menyiapkan agenda Kukar Bersholawat Jilid 2. Setelah disambut antusias oleh kaum muslimin pada gelaran Kukar Bersholawat Jilid 1 yang menghadirkan Habib Ali Zainal Abidin Assegaf.

Kukar Bersholawat Jilid 2 yang mendatangkan Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf ini, akan digelar saat bertepatan dengan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Direncanakan akan digelar di Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang. Dengan target mencapai 6 ribu jemaah.

"Kalau yang lalu kan targetnya 3-4 ribu, karena ini cakupannya stadion, maka target jemaah kita naikan," ucap Kabag Kesra Pemkab Kukar, Dendy Irawan Fahriza.

Nantinya, Pemkab Kukar akan meng-

gandeng Yayasan Majelis Al Kheir Wal Barokah Tenggarong. Yayasan inilah yang akan menyiapkan segala keperluan. Mulai dari berkoordinasi untuk mendatangkan Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf.

"Insya Allah mereka yang akan memfasilitasi, termasuk mereka juga yang berkoordinasi dan menjembatani komunikasi dengan Habib Syech," lanjut Dendy.

"Tapi kurang lebih pelaksanaannya sama dengan jilid pertama, dan ini mungkin jauh lebih tertib lagi, karena kita sudah belajar dari pengalaman yang pertama," sambungnya.

Selain itu, Pemkab Kukar juga melibatkan banyak organisasi Islam untuk turut serta, dan mensukseskan gelaran Kukar Bersholawat jilid 2.

"Organisasi Islam tentu kita libatkan juga. Jadi, kami harap mas-

yarakat Kukar dan sekitarnya dapat ikut datang bersholawat bersama," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin berharap Kukar Bersholawat jilid 2 dapat berjalan lancar seperti pelaksanaan yang pertama.

Ia berharap dukungan masyarakat untuk kelancaran dan ketertiban jalannya acara, termasuk untuk ikut serta menjaga kebersihan.

"Insya Allah ini akan berjalan lancar juga. Karena dilihat dari Kukar Bersholawat pertama, semua berjalan aman dan lancar, dan semoga yang kedua juga sama, dengan antusiasme masyarakat yang lebih besar lagi," tutup Rendi singkat. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Bupati Kukar, Edi Damansyah.

Keinginan Kesultanan, Bupati Kukar Terima Usulan Museum Dijadikan Kawasan Budaya

TENGGARONG - Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura mengusulkan wilayah Museum Negeri Mulawarman Tenggarong dan sekitar menjadi kawasan budaya. Saat para wisatawan yang masuk di area tersebut, wajib mengenakan pakaian budaya, salah satunya menggunakan pesapu.

Hal ini disampaikan langsung oleh kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Muhammad Heriansyah, gelar Pangeran Noto Negoro saat menyampaikan sambutan usai ritual merebahkan tiang Ayu di Keraton, Museum Negeri Mulawarman Tenggarong. Senin(2/10/2023) kemarin.

"Agar Tenggarong yang sudah berusia 241 tahun, jauh lebih lama daripada berdirinya NKRI benar-benar dimaknai menjadi kota budaya. Wilayah keraton dan kedaton bisa ditetapkan wilayah budaya, jadi yang masuk kawasan wajib memakai pakaian budaya, seperti pesapu dan lain-lain," ucap Heriansyah.

Selain itu bisa mengadakan pagelaran, sehingga para pelaku dan komunitas seni bisa memiliki wadah

menyalurkan bakatnya. Dirinya juga berharap agar Car Free Day juga bisa diselenggarakan di sekitar kedaton. "Sehingga mendorong ekonomi UMKM bisa tumbuh di sekitar sini," sebutnya.

Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura juga memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah membangun sejumlah area publik yang diberi nama yang berhubungan dengan kesultanan, seperti Menara Mahkota Tuah Himba dan Taman Keraton Titik Nol Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Di sisi lain pihaknya juga mengusulkan kapal Kartanegara yang berada di Waduk Panji Sukarame, kendaraan dari Sultan AM Parikesit dalam menjalankan roda pemerintah, hadiah dari pemerintah Belanda bisa di pindahkan ke kawasan Tanjung di tepi Mahakam.

"Ada nilai-nilai sejarah yang bisa diwariskan kepada generasi muda. Bisa menjadi icon objek wisata daripada kondisi memprihatinkan," harapnya.

"Kami berharap niat baik dan kesultanan bisa diterima dan ditindak-

lanjuti," sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menerima baik dan siap mengkaji sejumlah usulan yang disampaikan, terkait ingin ditetapkannya kawasan Museum menjadi kawasan budaya.

"Saya kira kami menyambut hal baik itu, mungkin nanti akan dilakukan kajian-kajian sehingga ini bisa ditetapkan dalam kebijakan lokal di Kabupaten Kutai Kartanegara," ucap Edi Damansyah.

Termasuk permintaan pemindahan unit kapal bersejarah yang ada di Waduk Panji Sukarame. Nanti juga akan dikaji dan dimusyawarahkan kembali. Edi menambahkan bahwa pemerintah kabupaten mendukung sepanjang itu bagian sarana dan prasarana. Sejarah yang diketahui oleh generasi dan mempunyai daya tarik untuk Kota Tenggarong.

"Pengembangan pariwisata, saya kira kami support semua dalam persoalan itu," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari

Tangani Masalah Sampah, Kelurahan Loa Ipuh Siapkan Bank Sampah Tiap RT

TENGGARONG - Masalah sampah menjadi salah satu isu yang sedang dikerjakan Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong. Memastikan pengelolaan sampah di kelurahan terbesar di Tenggarong itu, bisa tertangani dengan baik dengan melakukan beberapa inovasi.

Salah satunya dengan membentuk Bank Sampah yang melibatkan masing-masing Rukun Tetangga (RT). Sehingga sampah rumah tangga warga bisa langsung tertangani, dan terpilah sebelum masuk ke Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Erri melanjutkan, pengelolaan sampah berbasis RT ini akan terealisasi pada Oktober 2023. "Targetnya adalah 30 persen pengurangan tumpukan sampah rumah tangga di TPA," jelas Lurah Loa Ipuh, Erri Suparjan.

Untuk saat ini, di Kelurahan Loa Ipuh baru ada dua Bank Sampah yang terbilang aktif. Masing-masing dikelola oleh warga dan pihak swasta. Tentu jika masing-masing RT di Kelurahan Loa Ipuh yang berjumlah 77 RT memiliki Bank Sampah mas-

ing-masing, maka ia menyakini permasalahan sampah di wilayahnya akan tertangani dengan baik.

"Agar sampah rumah tangga ini bisa dikelola optimal, jadi kita akan bentuk lagi Bank Sampah di tiap-tiap RT. Insya Allah kita akan mulai dari awal minggu Oktober ini," pungkasnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang yang dilirik Borneo FC sebagai home base Liga 1 Indonesia.

Dilirik Pesut Etam, Kadispora Kukar: Fasilitas Stadion Aji Imbut Segera Diperbaiki

TENGGARONG - Setelah dilirik oleh tim Liga 1 Indonesia Borneo FC, kini Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar) siap berbenah. Melakukan sejumlah perbaikan fasilitas yang diketahui sudah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Termasuk kondisi rumput lapangan yang menguning, pasca digunakan untuk KukarLand Festival 2023 lalu.

Langkah awalnya, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar, pun memulai melakukan penilaian. Mengecek fasilitas apa saja yang harus diperbaiki, dan sesuai standar

home base untuk klub peserta Liga 1 Indonesia.

"Termasuk rumput ini kami menunggu dari manajemen Borneo FC untuk memastikan hasil penilaian mereka," ujar Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni.

Namun, pihaknya pun akan kembali memastikan langkah dari tim Pesut Etam, pasca sidak Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang, beberapa waktu lalu. Jika memang ada kata sepakat untuk menggunakan stadion termegah di Kukar tersebut, maka fasilitas yang dianggap penting dan menurut mereka kurang akan

segera diperbaiki.

"Yang pasti PR terbesar adalah rumput dan lampu. Rumput Insya Allah ada perawatan tahun ini, setelah itu langsung off kan (ditutup) lapangan, langsung kita lakukan perawatan dengan baik," lanjut Ali.

"Kalau lampu masih dalam tahap perencanaan perhitungan berapa pembiayaan yang dimunculkan dari perbaikan lampu yang ada," tutup Ali. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Seminar pendahuluan terkait penelitian pengelolaan sampah di 6 kecamatan di Kukar.

BRIDA Kukar Tetapkan 6 Kecamatan Jadi Lokus Penelitian Pengelolaan Sampah

TENGGARONG - Sejumlah penelitian dan kajian dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kutai Kartanegara (BRIDA Kukar), salah satunya terkait pengelolaan sampah di Kukar. Total ada 6 kecamatan yang masuk dalam radar penelitian, seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabd) Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Brida Kukar, Karno.

"Sebelumnya melakukan penelitian, kami sudah melakukan seminar pendahuluan. Sekarang masuk dalam proses penelitian lapangan," jelas Karno belum lama ini.

Sejumlah pihak dilibatkan oleh BRIDA Kukar untuk melaksanakan

seminar pendahuluan. Diantaranya membahas pendahuluan penelitian, metodologi penelitian, hingga rumusan masalah. Dalam seminar pendahuluan yang digelar pada pertengahan bulan lalu, BRIDA Kukar sudah meminta tanggapan sejumlah ahli.

Sebut saja dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kukar, dan akademisi Jurusan Teknik Lingkungan, Universitas Muluwarman (Unmul) Samarinda.

"Kami ingin masukkan dari sejumlah pihak sebelum melakukan penelitian di lapangan," jelasnya.

Tujuan penelitian ini, Karno mengatakan pihaknya tengah mencari

informasi tentang pengelolaan sampah di enam kecamatan di Kukar. Masing-masing di Kecamatan Sangasanga, Muara Jawa, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong, dan Muara Badak.

Sementara sebagai penanggungjawab survei, Brida Kukar memberi kepercayaan kepada Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. "Kami memilih universitas itu karena mereka sudah memiliki pengalaman penelitian pengelolaan sampah di Yogyakarta," pungkasnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



Koran DIGITAL



MEDIA KALTIM.com

Lebih Dekat dengan Satu Klik



<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0811 5405 033

 media_kaltim
  mediakaltimdotcom
  mediakaltim.com
  media kaltim



Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris.

Waris Minta Eksekutif Evaluasi Program 1.000 Titik WiFi Gratis

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau telah merealisasikan 1.000 titik WiFi gratis pada tahun ini. Hal itu diapresiasi Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris.

Dia menilai, dengan adanya 1.000 titik WiFi gratis tersebut, sangat memudahkan masyarakat melakukan aktivitas di zaman serba internet seperti saat ini. "Setiap kampung dapat, minimal di kantor pemerintah kampung harus ada," ungkapnya.

Dirinya meminta eksekutif untuk mengevaluasi daerah yang belum menikmati WiFi gratis tersebut. Khususnya wilayah pariwisata maupun tempat umum lainnya. "Nanti akan diusulkan lagi. Kami ingin ditambah-

kan lagi, selama anggaran masih mencukupi," ujarnya.

Politikus Demokrat ini meminta komitmen Pemkab Berau agar pemasangan WiFi gratis ini tak hanya sekadar simbolis, namun tidak dapat digunakan masyarakat.

"Jangan memakan anggaran yang tak sedikit, tetapi tidak bermanfaat bagi masyarakat secara luas," katanya.

"Jika hanya untuk pemenuhan janji politik saja, namun tidak dapat digunakan ya buat apa," sambungnya.

Ditanya terkait besaran anggaran yang dikeluarkan Pemkab Berau untuk pembayaran 1.000 titik WiFi gratis itu, Waris menyebut sekisar Rp 10 miliar per tahunnya.

"Pemerintah harus komitmen. Jumlah pembayaran itu cukup besar, sangat disayangkan jika tidak dimaksimalkan dan juga dikhawatirkan nanti tidak dibayar," imbuhnya.

Kendati demikian, untuk daerah yang masih dalam status blank spot, akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak provider. Karena, masih banyak wilayah Berau yang minim soal jaringan internet.

"Selama ini wilayah yang belum mendapat jaringan hanya mengandalkan satelit atau tempat tertentu. Untuk itu akan kita diskusikan bersama pemerintah untuk penyelesaiannya," tandasnya. (adv/dez)

Andi Amir Harap Ada Regenerasi Petani

TANJUNG REDEB - Beberapa waktu lalu, Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah menyerahkan bantuan kepada kelompok tani di Kampung Suka Murya, Kecamatan Talisayan.

Dia mengatakan, penyerahan bantuan tersebut bertujuan membantu petani untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. "Supaya mereka juga semakin semangat," ungkapnya.

Dirinya mengharapkan dengan adanya bantuan alat pertanian itu, memicu regenerasi petani. Selain itu juga sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat yang ada di Daerah Pemilihan (Dapil)-nya.

"Ini juga merupakan bentuk sebagian kecil dari realisasi serapan aspirasi yang sempat saya lakukan beberapa waktu lalu di kampung tersebut," terangnya.

Andi Amir membeberkan, hingga saat ini petani di Suka Murya belum mendapat perhatian dari pihak mana pun. Hal inilah yang mendorong dirinya, untuk turun ke lapangan menyapa petani, dan menyerahkan bantuan.

"Benar, saya banyak dapat laporan dari masyarakat akan hal ini. Makanya saya coba datang, dan menyerahkan bantuan ini," tuturnya.

Pada saat melaksanakan reses, kata dia, banyak menerima keluhan masyarakat warga yang mengaku tidak pernah tersentuh oleh bantuan apapun dari pemerintah.

"Saya prihatin dengan peristiwa yang menimpa masyarakat di sini. Apalagi, mayoritas masyarakat menggantungkan hidup dengan bertani dan berkebun," katanya.

"Sementara saya bantu sebisa mungkin. Meskipun tidak seberapa, setidaknya petani di sana bisa memiliki



Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah

dorongan semangat bekerja dari apa yang di perbantukan," tambahnya.

Politikus Golkar ini berharap, masyarakat dapat memaksimalkan bantuan yang diberikan saat ini. "Ini hanya sebagian kecil. Adapun aspirasi lainnya tentu tetap akan saya kawal dan perjuangkan," tegasnya.

Permasalahan regenerasi petani juga menurut Andi Amir perlu dilakukan, agar petani yang sudah berumur, bisa menikmati masa tuanya. "Jika petani muda malu, kasihan petani yang sudah tua, harus turun ke lapangan. Tidak usah malu," tandasnya. (adv/dez)



Ketua DPRD Berau, Madri Pani

Ketua DPRD Berau Tegaskan Jangan Ada Perbedaan di Dunia Pendidikan

TANJUNG REDEB - Sektor pendidikan dinilai Ketua DPRD Berau, Madri Pani harus lebih diperhatikan. Sebab, kualitas sangat berpengaruh terhadap suatu kemajuan bangsa.

Dikatakannya, saat ini pembangunan sekolah selalu dilakukan di perkotaan. Hal itu menurutnya membuat sekolah yang ada di wilayah perkampungan merasa iri.

"Padahal pembangunan infrastruktur harus disamaratakan. Jangan memandang letaknya ada di mana. Tetapi diupayakan bagaimana seluruh sekolah yang ada di Berau ini layak jadi tempat belajar dan mengajar," ungkapnya.

Dia menegaskan, pemerintah harus maksimal dalam mengelola anggaran untuk pendidikan. Terlebih 20 persen dari APBD digelontorkan untuk sektor tersebut.

"Dengan besarnya APBD kita ini justru tidak layak jika masih ada sekolah yang kondisinya memprihatinkan," imbuhnya.

Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini menyebut, proses belajar mengajar harus maksimal. Jangan sampai, kata Madri, ada perbedaan di dunia pendidikan kabupaten paling utara Kaltim ini.

"Padahal pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap masa depan anak-anak. Jangan ada perbedaan antara yang di perkotaan dan perkampungan. Saya harap ini jadi perhatian," tandasnya. (adv/dez)

Ichsan Dorong Eksekutif Beri Dukungan yang Masif untuk Dunia Literasi

TANJUNG REDEB - Dunia literasi sangat berpengaruh terhadap ilmu yang dimiliki seseorang. Maka dari itu, Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi mendorong eksekutif untuk memberi dukungan yang masif.

Dia menerangkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus fokus kepada perkembangan literasi di Bumi Batiwakkal. Pasalnya dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Literasi itu penting, apalagi kebodohan telah banyak memakan korban. Kita harus rajin baca buku, baik itu bentuk fisik maupun digital," katanya.

Dirinya mengaku merasa prihatin. Sebab masih minimnya tenaga perpustakaan yang mengantongi akreditasi. Termasuk perpustakaan yang sudah berjenjang nasional.

"Hal itu saya ketahui setelah mendengar pemaparan Ketua Atpusi Berau, Mariani saat festival literasi beberapa waktu lalu," ungkap pria yang juga Ketua Gerakan Pemasarakatan Minat Baca (GPMB) Berau ini.

Ichsan menilai, pustakawan harus orang-orang yang profesional di bidangnya. Maka dari itu, kata dia, tenaga perpustakaan yang terakreditasi perlu ditingkatkan.

"Termasuk perpustakaan sekolah yang belum bertaraf nasional ini yang harus juga kita perhatikan, bagaimana langkahnya, paling tidak dengan menambah koleksi buku-buku baru dan terpopuler," ungkapnya.

Agar keinginan tersebut tercapai, terangnya, diperlukan minat yang tinggi oleh anak didik. Untuk menariknya, perpustakaan harus modern.

"Jadi kita pancing dulu minatnya dengan edukasi yang bagus, ditambah fasilitas pendukung. Makanya perpustakaan juga harus bisa bertransformasi dengan lebih baik dan modern," tutupnya. (adv/dez)



Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi

Wendy Tegaskan Kepala Daerah Harus Selektif dalam Membagi Anggaran ke OPD



Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya

TANJUNG REDEB - Kepala daerah diharapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya selektif dalam membagi anggaran ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, seharusnya anggaran diprioritaskan ke OPD yang memiliki rencana kerja paling bermanfaat dan penting untuk masyarakat secara luas.

Dia membeberkan, saat pembahasan kebijakan umum APBD (KUA) dan PPAS beberapa waktu lalu, banyak program yang timbal balik ke masyarakat dalam jangka panjang sangat minim.

"Seharusnya program kerja yang mempunyai timbal baik untuk orang banyak perlu diprioritaskan. Seperti contoh penanganan TPA dan bantuan pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani," katanya.

Wendy juga menyebut, mengenai bantuan untuk pertanian, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Berau mengharapkan bantuan dari Pokok Pikiran

(Pokir) anggota DPRD. "Tetapi kalau dari dewan, jumlahnya itu terbatas. Berbeda jika proker tersebut masuk ke dalam APBD," terangnya.

"Karena pokir dewan tidak bisa disamakan dengan program kerja yang memang asalnya dari bupati, karena kami memiliki hak masing-masing untuk mengelola anggaran," tambahnya.

Dengan demikian, visi dan misi kepala daerah yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menurut Wendy perlu selaras dengan program kerja OPD. Hanya saja kendala anggaran yang tidak sesuai membuat beberapa OPD kerap kesulitan saat akan action di lapangan.

"Tentu semua itu kan memakai anggaran, OPD nya ngeluh sama kami. Setelah kami telaah kondisinya juga begini (anggaran minim, red). Sementara yang sangat kami sayangkan ada OPD lain yang tidak begitu bermanfaat program kerjanya itu anggarannya besar," pungkasnya. (adv/dez)



Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan (SKPK) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim), Siti Djaitun S.Sos MSi.

Karir ASN Jabatan Fungsional Akan Ditentukan dengan Angka Kredit yang Didapat

SAMARINDA-Seorang pejabat fungsional harus memahami peraturan yang menjadi landasan karirnya, karena jabatan fungsional sangat berbeda dengan jabatan administrasi maupun jabatan pimpinan tinggi, terutama dari segi kenaikan pangkatnya.

Hal ini dikatakan Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan (SKPK) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim), Siti Djaitun S.Sos MSi, saat Sharing Session ke-43 dengan tema Pengelolaan dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional yang digelar oleh BPSDM pada Selasa (3/10/2023) melalui aplikasi Zoom.

Siti menyebutkan, Jabatan Fungsional Merupakan Jabatan Karir Aparatur Sipil Negara yang bertugas

memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Ketentuan Umum tentang Jabatan Fungsional ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional.

Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Pejabat Fungsional. Angka kredit ini diperoleh dari Predikat Kinerja yang dilaksanakan secara tahunan atau dilakukan secara periodik yang dapat dihitung secara proporsional. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional

sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

"Seorang pejabat fungsional naik pangkat dengan menggunakan angka kredit, berbeda dengan jabatan administrasi yang kenaikan pangkatnya reguler (4 tahun sekali)," ujarnya.

Peraturan ini dibuat lebih teknis agar mudah dipahami dan diimplementasikan sehingga dapat memberikan landasan bagi instansi pemerintah dalam melakukan pembinaan Jabatan Fungsional.

"Dengan ditetapkannya peraturan ini, Jabatan Fungsional dapat bekerja secara terorganisir dan kolaboratif dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi," tutupnya. (ADV/Han/BPSDM)

Pewarta: Hanafi

Editor: Agus Susanto



Isran Noor Saat Membuka Kegiatan pengembangan Kompetensi ASN dan Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim di Hotel Mercure Samarinda beberapa waktu lalu.

Isran Noor, Sang Pejuang Tenaga Honorer Kaltim

SAMARINDA – Pejuang Kesejahteraan Honorer Indonesia mungkin layak disandang oleh Isran Noor mantan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) yang baru saja mengakhiri masa jabatan 1 periodenya ini, betapa tidak perjuangan dan perhatian beliau terhadap tenaga non Aparatur Sipil Negara ini tidak main-main.

Bahkan ketika ada rencana penghapusan tenaga honorer berhembus, Isran adalah salah satu kepala daerah di Indonesia yang bersuara keras menolak wacana itu.

Semasa menjabat Gubernur Kaltim, Isran kerap memasang badan untuk memperjuangkan agar tidak ada menghapus tenaga honorer provinsi.

Rencana penghapusan tenaga honorer mulai didengungkan ke publik pada pertengahan tahun 2022.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) saat itu yang dijabat oleh Almarhum Tjahjo Kumolo, mengeluarkan surat edaran nomor B/185/M.SM.02.03/2022 pada 31 Mei 2022 dan menyebut bahwa keberadaan tenaga honorer akan dihapus pada 28 November 2023.

Tak mengindahkan rencana pemerintah pusat, Isran melawan arus dengan menolak kebijakan tersebut. Alih-alih penghapusan, Isran mengusulkan agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tak hanya itu, baru di masa Gubernur Isran, berbagai manfaat diterima para tenaga honorer. Mulai dari Tunjangan Hari Raya (THR) dan tanggungan BPJS Kesehatan serta Ketenagakerjaan.

Menjadi Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Pada 26 Oktober 2022, dimanfaatkan Isran untuk memperjuangkan penolakan penghapusan tenaga honorer ke pemerintah pusat.

Hubungan baiknya dengan Menpan RB saat ini, Abdullah Azwar Anas, memudahkan komunikasi perihal upaya mempertahankan pegawai non ASN. Pemerintah pusat akhirnya membatalkan rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 dan menyiapkan formula baru dalam mengakomodasi 2,3 juta pegawai non ASN seluruh Indonesia.

Di masa akhir jabatannya sebagai Gubernur Kaltim, Isran bahkan masih menjamin keberadaan tenaga honorer tidak akan dihapus.

“Meski nanti saya tidak menjabat, saya masih pantau. Tenang

saja, kalian (tenaga honorer) tidak akan dihapus,” ujar Isran saat memberikan sambutan pada kegiatan pengembangan Kompetensi ASN dan Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim di Hotel Mercure Samarinda beberapa waktu lalu.

Di tengah-tengah sambutannya tersebut, Isran sempat berhenti berbicara, sambil membuka-buka catatannya, sekitar beberapa menit Isran kemudian kemudian beralih dari podium menuju meja narasumber mengambil tisu dan kembali lagi ke podium, ternyata beliau ingin menghapus air matanya yang dari tadi menutupi pandangannya.

Dia pun berpesan kepada seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak marah-marah kepada bawahannya terutama PPPK, karena menurutnya marah-marah tidak akan menyelesaikan masalah.

“Buat pimpinan OPD semuanya, saya titip mereka ini. Jangan dimarahi kalau mereka ada berbuat salah, karena tidak akan menyelesaikan masalah, kasih tahu lah dengan baik-baik,” katanya dengan mata yang berkaca-kaca.

Termasuk perilaku dan sikap para pejabat tinggi pratama atau pejabat eselon dalam berkomunikasi dengan bawahan (staf). “Saya harap pimpinan OPD baik provinsi dan kabupaten/kota, jadilah pemimpin yang mengayomi bawahannya,” pintanya.

Pesan juga diharapkan kepada para pejabat jabatan tinggi pratama atau sekretaris daerah provinsi, kabupaten dan kota sebagai pimpinan tertinggi di bawah gubernur, bupati dan wali kota merupakan pejabat pembina kepegawaian. “Anak buah itu bagian daripada diri kita sendiri,” lanjutnya.

Sebab bagaimana pun juga, ungkap orang nomor satu Benua Etam itu, bahwa pimpinan sebagai pembina bawahan wajib memiliki tanggungjawab,

maka tidak boleh membiarkan bawahannya dalam posisi salah.

“Tinggal bagaimana kita berkomunikasi. atau sampaikan informasi secara baik. Pokoknya jangan marah, sebab itu akan menambah gap antara pimpinan dengan bawahan,” pungkasnya.

Dalam suasana haru, Isran sempat bergurau dengan lawakan yang memang menjadi ciri beliau yang suka bercanda saat memberikan sambutan. “Pak m, kita harus kasihan sama mereka (PPPK), pendapatan masih kecil, banyak tanggungan mereka, punya anak satu dan istri 3,” candanya.

Tapi Isran juga memuji seluruh Pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim, adalah pemimpin yang baik. “Tapi kebetulan para pimpinannya bagus-bagus semua, OPD-OPD itu. Mereka sayang semua sama anak-anak buahnya,” pujiannya. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari

TOYOTA LET'S GO BERSYAWAZI

SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN
* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel

GUARANTEE
PALING HEMAT
GUARANTEE

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Drusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN



<http://dinkes.kaltimprov.go.id>

Dra. Sri Wahyuni M.P.P.
SEKDA PROV. KALTIM

Dr. Akmal Malik, M.Si
PD GUBERNUR KALTIM

dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



ISTIMEWA

Kepala Dinkes Kaltim memaparkan evaluasi APBD.

Dinkes Kaltim Gelar Evaluasi APBD Tahun 2023

BALIKPAPAN- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi kegiatan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2023.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinkes Kaltim, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian indikator kinerja," jelas Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin, Rabu (4/10/2023).

Lebih lanjut, Dinkes Kaltim melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan dan memasukkan hasil pantauan dan evaluasi itu ke aplikasi Evapor Bappeda.

Dalam kegiatan pemantauan-evaluasi itu juga membahas rencana umum pengadaan (RUP) barang/

jasa melalui swakelola maupun penyedia layanan.

"Kami harus menetapkan dan mengumumkan RUP sesuai dengan ketentuan Perpres 16 tahun 2018," ungkapnya.

Menurutnya, RUP harus dimuat dalam aplikasi SIRUP dan dapat ditambahkan dalam situs web, papan pengumuman, surat kabar, atau media lain. RUP juga harus diperbarui jika ada perubahan atau revisi paket pengadaan atau DIPA/DPA.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa itu juga wajib menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan Perpres No. 12/2021.

Produk dalam negeri yang digunakan harus memiliki nilai TKDN ditambah BMP minimal 40 persen. Nilai TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan

oleh kementerian perindustrian.

"Pengadaan barang impor hanya dapat dilakukan jika barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. LKPP dan/atau kementerian/ lembaga/pemerintah daerah juga harus memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik," imbuhnya.

Menurut informasi, Dinkes Kaltim juga mendapatkan paparan dari narasumber dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kaltim sebagai bahan masukan dan pembelajaran bagi Dinkes Kaltim dalam melaksanakan program dan kegiatan serta pengadaan barang/jasa. (adv)

Pewartu : Nita

Editor : Nicha Ratnasari



BPKAD dan DPKD Kaltim Musnahkan Arsip Berusia Lebih dari 10 Tahun

SAMARINDA - Arsip yang telah melampaui batas usia ideal yakni 10 tahun harus dimusnahkan. Hal ini berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemusnahan Arsip.

Atas dasar tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kaltim melakukan pemusnahan Arsip Ex Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim kurun waktu Tahun 2007 sekaligus penyerahan arsip statis kepada DPKD Kaltim, yang dilaksanakan pada Selasa (3/10/2023) bertempat di Aula Kantor BPKAD Jalan Kusuma Bangsa Samarinda Kota.

Pemusnahan arsip tersebut, dihadiri langsung oleh Arsiparis Alih Media Ketua Tim Akuisisi Kementerian Lembaga Perpindahan Ibukota Negara, Drs. Tato Purjianto, Asisten Gubernur Bidang Administrasi Umum, Ir. Riza Indra Riadi, M.Si., Plh DPKD Kaltim Taufick S.Sos, M.Si Dan Kepala BPKAD Kaltim, Fahmi Prima Laksana, S.E, MM

Kepala BPKAD Kaltim, Fahmi Prima Laksana, S.E, MM dalam sambutannya sekaligus membuka acara menyebutkan bahwa di lembaganya terdapat 9.425 berkas arsip statis, 85 berkas arsip akan diserahkan dan disimpan DPKD Kaltim, dan data lainnya 2.236 arsip disimpan BPKAD berstatus inaktif dan 6.707 arsip disetujui untuk dimusnahkan.

"6.707 arsip telah disetujui dimusnahkan, saya sangat apresiasi pejuang arsip BPKAD. Sejak 2015, BPKAD sudah melakukan pemusnahan arsip sebanyak 5 kali. Semoga semangat menjaga dan merawat arsip

ini dapat menjadi inspirasi bagi SKPD lainnya dalam upaya tertib pengelolaan arsip," papar Fahmi.

Fahmi melanjutkan, BPKAD menjadi SKPD yang dinilai baik dalam pengelolaan arsip setelah Universitas Indonesia. Namun, bukan hanya dari segi prestasi yang harus ditiru akan tetapi komitmen dalam menjaga arsip terkelola secara berkelanjutan yang menjadi harapan Fahmi kepada seluruh OPD di Kaltim.

"Bukan hanya prestasi, Yang paling penting adalah komitmen dalam menjaga arsip terkelola secara berkelanjutan," pungkasnya.

Sementara itu, Plh Kepala DPK Kaltim, Taufik, S.Sos, M.Si, memberikan apresiasi kepada DPKAD atas dedikasinya dalam menjaga pengelolaan arsip dengan tertib.

Taufik menyebutkan saat ini baru terisi 25 persen penyimpanan arsip OPD di Depo Arsip DPK Kaltim. Ia berharap 75 persen dari ruang penyimpanan Depo Arsip turut dapat diisi oleh berkas OPD lainnya.

"DPKD Kaltim menjadi pilot proj-

ect untuk OPD lain dalam menerapkan sistem penataan arsip. Mohon partisipasinya secara professional kepada masing-masing OPD. Arsip yang dikelola dengan baik akan mempunyai nilai yang sangat vital dan penting," jelas Taufik kepada para audiens yang hadir.

Usai sambutan agenda kemudian dilanjutkan dengan proses pemusnahan arsip melalui mesin pencacah arsip oleh Plh Kepala DPK Kaltim, Kepala BPKAD Kaltim, dan perwakilan ANRI. Ditutup dengan penyerahan arsip statis secara simbolis oleh BPKAD kepada DPK Kaltim.

Diketahui, Pemusnahan arsip merupakan salah satu cara penyusutan arsip sehingga penyelenggaraan kearsipan menjadi lebih efektif dan efisien. Pemusnahan arsip juga bertujuan untuk mengamankan informasi arsip dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (ADV)

Pewartu : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Pemusnahan arsip menggunakan mesin pencacah arsip.



Sejumlah anggota Komisi III DPRD Balikpapan saat melakukan tinjauan di Jalan MT Haryono, tepatnya di DAS Ampal.

Komisi III DPRD Balikpapan Kecewa, Banyak Pipa PDAM Patah Akibat Proyek DAS Ampal

BALIKPAPAN - Sering dikeluhkan masyarakat yang melintas di Jalan MT Haryono tepatnya proyek DAS Ampal yang tak kunjung selesai dikerjakan, debu dan kemacetan selalu terjadi di kawasan tersebut.

Komisi III DPRD Balikpapan pun bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan serta pihak konsultan proyek melakukan tinjauan lapangan ke lokasi pekerjaan DAS Ampal di Jalan MT Haryono, Balikpapan Selatan.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Kamaruddin Ibrahim mengatakan, setelah meninjau langsung ke lokasi, banyak persoalan yang berkaitan dengan patahnya pipa-pipa PDAM akibat pekerjaan dari kontraktor PT Fahreza Duta Perkasa.

"Melihat kondisi di lapangan, tentu kami merasa kecewa, bahkan tidak bisaberkata-katalagi dengankelakuan kontraktor," ujarnya, Rabu (4/10/2023).

Dijelaskan Kamaruddin Ibrahim, akibat pekerjaan PT Fahreza Duta Perkasa tersebut membuat Kota Balikpapan menjadi rusak. Karena satu lokasi pekerjaan belum selesai, sudah merusak lokasi yang lain. Dan itupun dilakukan hanya untuk mengejar progres.

"Kami sudah kehabisan kata untuk PT Fahreza ini, silakan masyarakat saja yang menilainya, apa yang harus dilakukan pemerintah," jelas Kamaruddin.

Menurutnya, langkah yang diambil DPRD Balikpapan sudah dilakukan dengan merekomendasikan untuk putus kontrak sejak awal, namun tidak diindahkan. Bahkan, teguran setiap sidak juga sering diberikan, namun karena PT Fahreza ini kontraktor yang bandel, jadi tidak menghiraukannya.

"Jadi kami menunggu ketegasan dari Pemerintah Kota aja, seperti apa ke depannya menyikapi hal ini," tambahnya.

Bahwa keputusan untuk memutus

kontrak PT Fahreza Duta Perkasa ini ada di Pemerintah Kota. Namun DPRD Balikpapan sudah menyuarakan apa yang menjadi keluhan masyarakat terkait dengan debu, kemacetan, kerusakan jalan, estetika kota dan juga kerusakan pipa PDAM.

"Apalagi pipa yang sudah disambung, kembali putus di tempat lain, itu karena pekerjaannya serampangan," tegasnya.

Berdasarkan informasi yang diterima dari DPU dan konsultan, bahwa PT Fahreza Duta Perkasa tidak mengindahkan semua perintah yang diberikan. Untuk itu, ia minta agar Wali Kota Balikpapan bisa bersikap tegas terhadap kontraktor, karena hal seperti ini tidak bisa dibiarkan.

"Jadi kami tunggu ketegasan Pemerintah saja, karena bolanya ada di Wali Kota," tutupnya. (ADV)

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



Bersama Dinsos, DPRD Kukar Studi Banding Penanganan Kemiskinan Ekstrem

TENGGARONG - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), terus mencari cara untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kutai Kartanegara (Kukar). Memastikan penanganan warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dapat terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Salah satunya dengan melakukan kunjungan kerja dan studi banding ke daerah yang dianggap berhasil penanganannya. Yakni dengan melakukan lawatan ke Kabupaten

Kutai Timur (Kutim) belum lama ini, bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kukar.

Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Baharuddin, menjelaskan penanganannya pun harus berbasis data. Dari hasil kunjungan mereka ke Kutim, agar penerima manfaat tepat sasaran, maka Pemkab Kutim pun memasang papan pemberitahuan "warga miskin" di rumah-rumah yang benar-benar berhak menerima.

"Setiap penerima dibuatkan semacam papan dari kaleng di depan rumah dengan bahasa kurang lebih "saya orang

miskin" atau "saya penerima bantuan". Nah ini salah satunya," ujar Baharuddin.

Hal ini pun dianggap suatu inovasi yang bisa saja diterapkan di Kukar. Sehingga bantuan yang disalurkan melalui APBD ataupun APBN bisa menasar kepada yang berhak menerima. Memastikan penerima bantuan dan data yang dimiliki oleh Pemkab Kukar tersinkronisasi.

*Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari*



LET'S
GO
BEYOND



BOOKING THS SAJA BTS di Digiroom



DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNTETIC
SETIAP SERVICE BERKALA*



THS Sama Lengkapnya
Dengan Bengkel

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Kode Promo
BTSOLI

*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088





Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang



SYAKURAH/RADARBONTANG

Salah satu pasien menggunakan e-tiket obat

Hindari Penumpukan Antrean Obat, RSUD Gunakan E-Tiket

BONTANG - RSUD Taman Husada Bontang dinilai cukup melek untuk memaksimalkan pelayanan menggunakan teknologi, salah satunya adalah pengambilan tiket obat tanpa memberikan resep ke apotek, hanya melalui data.

dr. Siti Aisyatur Ridha dari tim humas RSUD Taman Husada menjelaskan, setelah melakukan pemeriksaan di poliklinik, pasien tidak perlu membawa kertas yang berisi resep dokter, ia hanya perlu mengambil e-tiket yang diprint hanya dengan memasukkan kode yang telah di berikan.

Setelah pasien berobat, dokter akan menginput obat apa saja yang diberikan dan data tersebut langsung masuk ke komputer apotek.

“Jadi ada monitor di samping tempat pengambilan obat, nah di situ nanti pasien mengisi nomor yang diberikan, dan tinggal menunggu,” jelasnya.

Pasien yang menunggu obat juga tidak harus menunggu si lobi rumah sakit, karena dalam data pasien akan diminta nomor handphone yang aktif untuk diberikan informasi kepada mereka jika obat sudah siap.

“Karena tidak semua orang bisa menunggu, siapa tahu ada kesibukan, nanti kami akan WhatsApp kalau obat mereka sudah bisa di ambil,” ujarnya.

Hal ini juga dimaksudkan agar antrian pasien berobat dan antrian pengambilan obat tidak menumpuk.

Dan apabila nomor pasien tercecer atau tidak lupa, pasien bisa memasukkan NIK atau nomor BPJS bila menggunakannya.

Selain itu, dalam monitor tersebut, pasien akan memberi penilaian terhadap dokter yang mereka visit, jika mendapatkan nilai di bawah 4 bintang, dihari yang sama pihak rumah sakit akan menyelesaikan permasalahan tersebut, tergantung dari yang pasien keluhkan.

“Kami tidak ingin berlarut-larut, sebelum banyak pasien yang komplain kami tegur langsung,” tambahnya. (adv)

Pewarta : Syakurah
Editor : Nicha Ratnasari



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Bidan menunjukkan kelengkapan ruang bersalin RSUD Taman Husada Bontang.

Miliki Fasilitas Lengkap, Kamar Bersalin RSUD Bontang Jadi Pilihan untuk Bersalin

BONTANG – Kamar Bersalin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Kota Bontang memiliki berbagai fasilitas untuk pelayanan ibu hamil dan bersalin. Di mana ada ruang Kala dengan 2 bed bagi ibu hamil yang sedang kontraksi saat masuk masa bersalin.

Humas RSUD Taman Husada Kota Bontang, dr Siti Aisyatur Ridha menjelaskan beberapa fasilitas yang ada di ruang bersalin milik RSUD Taman Husada. Ia mengatakan fasilitas-fasilitas di ruang bersalin cukup lengkap dengan memiliki fasilitas lengkap yakni ada baby infant warmer untuk menghangatkan bayi yang

baru lahir.

“Ada beberapa fasilitas di sini. Kami dilengkapi dengan fasilitas alat-alat persalinan. Ada tim bidang yang siap membantu,” jelas dr Ridha kepada Mediakaltim.com.

Dr Ridha menambahkan adapun, ketika pasien melakukan persalinan normal maka akan dilakukan tindakan di ruang bersalin. Namun ketika ada permasalahan dengan ibu dan bayi maka bidan akan berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan.

“Misalnya ada penyulitnya ketika melakukan persalinan maka bidan-bidan kami melakukan konsultasi ke dokter spesialis kandungan yakni

dokter penanggung jawab pasien. Ketika ada tindakan untuk operasi maka aksesnya cepat ke ruang Operative Kamer (OK) atau ruang operasi,” katanya.

Ia mengatakan RSUD Taman Husada sangat cocok bagi masyarakat sebagai pilihan bagi ibu untuk melahirkan.

Diberitahukan bahwa untuk ruang bersalin sendiri difasilitasi sebanyak 3 bed (tempat tidur) dan ruang kala atau ruang menunggu bersalin sebanyak 2 bed. (adv/yah)

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



YAHYA YABO/ MEDIA KALTIM

Ruang VIP Flamboyan di RSUD Taman Husada Bontang.

Ruang Flamboyan RSUD Bontang, Khusus Perawatan Kehamilan dan Kebidanan

BONTANG—Ruang Flamboyan adalah salah satu ruangan perawatan di RSUD Taman Husada. Ruangan ini mengakomodir kelompok jenis pelayanan kesehatan terkait pasien khusus kandungan dan kebidanan (persalinan).

Humas RSUD Taman Husada Bontang, dr Siti Aisyatur Ridha mengatakan ruangan Flamboyan sendiri terdiri dari kelas 3, kelas 2, kelas 1 dan VIP. Ia menambahkan ruang flamboyan memiliki SDM sebanyak 28 bidan dan 3 dokter spesialis kandungan.

“Kalau ruang mawar untuk pelayanan persalinan ada 6 bed. Ruang flamboyan terdiri dari kelas 3 ada 12 tempat tidur, kelas 2 ada 4 tempat tidur, kelas 1 ada 2 tempat tidur dan ruang VIP ada 1 tempat tidur. Tentunya kita memfasilitasi kelompok masyarakat yang menggunakan berbagai macam jenis jaminan kesehatan,” kata dr Ridha ditemui Media kalTIM.com.

Selanjutnya, dr Ridha mengatakan untuk ruangan VIP flamboyan 4 sendiri bagi perawatan pasca

melahirkan atau bagi yang memiliki masalah kehamilan.

“Ada permasalahan pada kehamilan yang perlu dirawat inap akan dilayani di sini. Spesifiknya untuk kandungan dan kebidanan. Adanya ruangan ini sebagai wujud realisasi salah satu misi RSUD yaitu menjadi rumah sakit sayang ibu dan bayi terbaik,” tandasnya. (adv)

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



MERCURE

HOTEL

SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE

Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 24 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 100 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:

@mercure_samarinda 0811 - 551 - 6000

all.accor.com

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Biggen Kawana No. 116A, Sebelang Kiri, Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

AUTO 2000
member of ASTRA

Urusan Toyota lebih mudah!

AYO IKUTI!!
LOMBA VIDEO PENDEK

TEMA
PERAN PUPR
MENDUKUNG INFRASTRUKTUR
DESTINASI WISATA

TOTAL HADIAH 33 JUTA RUPIAH

DAFTAR SEGERA

<https://forms.gle/xCaP8bLjtdAYkhH7>

NARAHUBUNG / CP :
Heny 081254559928
Shinta 082256114744

SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA

1. Peserta lomba terbuka untuk umum dengan usia min 17 tahun (kuota terbatas 40 tim)
2. Peserta lomba berkelompok min 3 orang max 4 orang
3. Video merupakan video pendek berjenis video profil infrastruktur pariwisata Kota Bontang berdurasi max 3 menit dengan resolusi video min 1920x1080px
4. Peserta harus mengisi formulir pendaftaran melalui link : <https://forms.gle/xCaP8bLjtdAYkhH7>
5. Video pendek bertema sesuai tema yang di tentukan
6. Peserta lomba hanya mengirim satu video pendek
7. Video belum pernah dilombakan dan dipublikasikan melalui media apapun
8. Video merupakan karya baru, original bukan hasil plagiat/mengambil sebagian hak cipta oranglain, apabila dikemudian hari terdapat gugatan hak cipta maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peserta lomba
9. Transportasi menuju 3 spot lokasi yang ditentukan oleh panitia dalam pengambilan video difasilitasi oleh dinas PUPR hanya 1 (Satu) hari
10. Video mencantumkan subtitle berbahasa Inggris
11. Video yang dikirimkan menjadi hak milik Dinas PUPR Kota Bontang
12. Wajib follow Instagram @ppid.dpuprbtg dan @bontang_tourism
13. Peserta tidak dipungut biaya apapun
14. Video tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, kesucilaan, moral, SARA, kekerasan, promosi produk komersial serta tidak mengandung unsur pornografi
15. Materi video dapat diterima panitia paling lambat tanggal 05 oktober 2023 pukul 23.59 wita melalui Email : dpupr25@gmail.com dan ke CP : SHINTA (082256114744)
16. Video yang dikirimkan berhak disiarkan atau ditayangkan oleh panitia untuk keperluan media edukasi dan promosi
17. Keputusan panitia dan dewan juri tidak dapat diganggu gugat
18. Informasi teknis lomba akan disampaikan pada technical meeting
19. Hal-hal yang belum diatur akan diinformasikan berikutnya.

Catat Waktunya :

- 21-27 September 2023 Pendaftaran
- 29 September 2023 (pukul 09.00 wita Seremoni peluncuran lomba video dan pukul 14.00 wita Technical Meeting)
- 30 September 2023 (pukul 06.00 wita Spot Hunting di 3 lokasi
 - Karang Pasilan (Snorkling)
 - Kampung Malahing
 - Pulau Beras Basah
 - + additional : Pulau Segajah
- 12 Oktober 2023 (pukul 20.00 wita pengumuman pemenang secara "live" di acara Gala Dinner HUT Kota Bontang Ke-24 di Pendopo Rujab Walikota)



Kanit Tipidter Satreskrim Polresta Balikpapan, Iptu Wirawan Trisnadi bersama pelaku pengetab BBM jenis Peralit, RM menunjukkan barang bukti.

Pengetab BBM di Balikpapan Ditangkap, Jual Bensin Bersubsidi ke Pom Mini

BALIKPAPAN - Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse Kriminal (Tipiter Satreskrim) Polresta Balikpapan berhasil mengamankan seorang pria berinisial RM (22) atas tindakan pengetapan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite pada Kamis (21/9/2023) lalu.

RM ditangkap saat tengah menjalankan aksi pengetapannya di kawasan Gunung Malang, Balikpapan Tengah pada pukul 20.00 Wita. Saat digeledah petugas, RM hanya bisa pasrah.

"Kita amankan pelaku saat memindahkan BBM jenis Peralit ditanki mobilnya ke jeriken yang sudah di siapkannya," ujar Kanit Tipidter Satreskrim Polresta Balikpapan, Iptu

Wirawan Trisnadi, Rabu (4/10/2023).

Lebih lanjut Wirawan menjelaskan, ditangkapnya RM berdasarkan laporan masyarakat bahwa terdapat sebuah mobil Toyota Kijang Krista dengan nopol KT 1033 DF yang berulang kali mengisi BBM jenis Peralite di SPBU Gunung Malang.

"Modusnya membeli Peralite dan menumpuhkannya ke jeriken yang ada di dalam mobilnya dengan mesin pompa kecil yang ada di dalam mobilnya juga," jelasnya.

Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa kendaraan roda 4 yang digunakan untuk mengetab serta 22 unit jeriken dengan total keseluruhan BBM jenis Peralite sebanyak 500 liter.

"Pelaku dan barang bukti langsung kita amankan ke Polresta Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," tambahnya.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui RM sudah beraksi selama 3 bulan. BBM jenis Peralite yang dibelinya dari SPBU, kembali dijual ke para pemilik Pom Mini dengan harga Rp 11.500 per liter.

"Atas perbuatannya kita jerat dengan Undang-undang Minerba, di mana ancaman kurungan penjaranya sampai 7 tahun dan dendanya sampai Rp 1 miliar," tutup Wirawan.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha Ratnasari



Bupati Paser, Fahmi Fadli (kanan) bersama Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik (tengah)

Ketidakinginan Penghapusan PTT Hingga Peningkatan Telekomunikasi di Paser, Harapan Bupati Untuk Pj Gubernur

PASER - Bupati Paser, Fahmi Fadli, memberikan dukungannya atas pesan yang disampaikan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2018-2023, Isran Noor, untuk tidak dilakukan penghapusan bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau tenaga honorer.

Hal tersebut disampaikan, sesuai Bupati Paser menghadiri kegiatan Serah Terima Jabatan (Sertijab) danpisahambut Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, di Gedung Convention Hall Samarinda, Rabu (4/10/2023).

Fahmi juga turut berkomitmen untuk tidak menghapus PTT dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser. "Saya sepakat dengan Gubernur. Pada masa jabatannya untuk tidak menghapus. Bahkan kami men-canangkan meningkatkan statusnya

menjadi PPPK," terangnya.

Ia mengharapkan, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, yang saat ini menjabat dapat memberikan perhatian kepada daerah utamanya pada daerah yang masih memiliki desa yang minim infrastruktur seperti di Kabupaten Paser.

"Infrastruktur yang minim, tentunya akan berpengaruh pada angka kemiskinan serta rendahnya indeks pembangunan di desa," tambahnya.

Kabupaten Paser saat ini, kata Fahmi masih banyak desa dengan infrastruktur minim utamanya dalam hal jaringan telekomunikasi dan internet yang akan berimbas pada percepatan digitalisasi desa.

Disamping itu, perkembangan digitalisasi merupakan satu tuntutan yang harus dilaksanakan, karena

saat ini sudah jamannya keterbukaan informasi. "Jika tidak terpenuhi maka daerah akan menjadi tertinggal," harapnya.

Sejauh ini, Pemkab Paser telah mengambil langkah dalam mengentaskan blank spot dengan melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Bahkan telah menggelontorkan anggaran di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Paser.

Gelontoran anggaran itu untuk melakukan pembangunan jaringan telekomunikasi dan internet. "Kami sudah kucurkan sejumlah anggaran untuk mengatasi masalah blank spot, dengan membangun jaringan telekomunikasi dan internet yang mengalami blank spot," ucapnya. (bs)



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Warga saat berbelanja di pasar murah Pemkab PPU, Rabu (4/10/2023).

Tekan Inflasi, Pemkab PPU Gelar Operasi Pasar Sembako Tiap Kecamatan

PPU - Menekan tingginya angka inflasi, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) gelar operasi pasar sembako di Pasar Nipah-Nipah mulai Rabu, (4/10/2023). Bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan sembako dengan harga yang relatif murah.

Kepala Dinas KUKM Perindag PPU, Saidin menyebut terdapat tiga jenis bahan pokok yang dipasarkan, beras, gula, dan minyak. Ketiga komoditas

tersebut merupakan bahan pokok yang memiliki pengaruh besar terhadap inflasi. "Sasaran kegiatan ini diperuntukkan kepada masyarakat umum dalam memenuhi kebutuhannya," ucapnya.

Dalam gelaran ini, disediakan sebanyak 1,5 ton beras, dengan harga Rp 50.000 per 5 kilogram (kg). Untuk gula disediakan 200 kg dijual 14.000 per kg dan 120 liter untuk minyak goreng seharga Rp 14.000 per liter.

Saidin mengatakan pengadaan operasi pasar sembako telah melibatkan distributor seperti Badan Usaha Logistik (BULOG) PPU dan pasokan tambahan dari Alfamidi.

Tentunya operasi pasar sembako atau pasar murah tidak dilaksanakan di satu titik. Setiap kecamatan dipastikan bakal mengadakan pasar sembako. "Masih ditentukan titiknya, tetapi setiap kecamatan pasti ada," ungkapnya. (SBK)





LOWONGAN JURNALIS

Media online **MEDIA KALTIM GROUP** membutuhkan beberapa tenaga profesional untuk bergabung di tim redaksi **SAMARINDA & PENAJAM PASER UTARA (PPU)** :

JURNALIS

SYARAT:

Maksimal usia 25 tahun, berjiwa tim, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kreatif, dan menyukai tantangan. Fresh graduate boleh melamar, diutamakan kandidat berpengalaman bidang jurnalisme atau media

Deadline Pengirim CV & Lamaran 30 September 2023.

Pastikan mencantumkan posisi yang dilamar pada subjek email atau pesan WA.

Kirimkan ke **redaksi@mediakaltim.com**

atau WA ke **0853-4894-3982 (SAMARINDA)**
0815-4910-5488 (PPU)

radar.
MEDIA

MEDIA KALTIM GROUP





DINKES KALTIM GELAR EVALUASI APBD TAHUN 2023



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIM



Dr. Akmal Malik, M.Si
PJ GUBERNUR KALTIM



dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Kepala Dinkes Kaltim memaparkan evaluasi APBD. (Istimewa)

DINKES KALTIM GELAR EVALUASI APBD TAHUN 2023

BALIKPAPAN- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi kegiatan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2023.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinkes Kaltim, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian indikator kinerja," jelas Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Muallimin, Rabu (4/10/2023).

Lebih lanjut, Dinkes Kaltim melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan dan memasukkan hasil pantauan dan evaluasi itu ke aplikasi Evapor Bappeda.

Dalam kegiatan pemantauan-evaluasi itu juga membahas

rencana umum pengadaan (RUP) barang/jasa melalui swakelola maupun penyedia layanan.

"Kami harus menetapkan dan mengumumkan RUP sesuai dengan ketentuan Perpres 16 tahun 2018," ungkapnya.

Menurutnya, RUP harus dimuat dalam aplikasi SIRUP dan dapat ditambahkan dalam situs web, papan pengumuman, surat kabar, atau media lain. RUP juga harus diperbarui jika ada perubahan atau revisi paket pengadaan atau DIPA/DPA.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa itu juga wajib menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan Perpres No. 12/2021.

Produk dalam negeri yang digunakan harus memiliki nilai TKDN ditambah BMP minimal 40 persen. Nilai TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh ke-

menterian perindustrian.

"Pengadaan barang impor hanya dapat dilakukan jika barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. LKPP dan/atau kementerian/lembaga/pemerintah daerah juga harus memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik," imbuhnya.

Menurut informasi, Dinkes Kaltim juga mendapatkan paparan dari narasumber dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kaltim sebagai bahan masukan dan pembelajaran bagi Dinkes Kaltim dalam melaksanakan program dan kegiatan serta pengadaan barang/jasa.

Pewarta : Nit
Editor : Nicha Ratnasari

**WASPADA ISPA,
WARGA DIIMBAU
GUNAKAN MASKER**

BACA HALAMAN 2-3



**PULUHAN SISWA SMP
IKUTI LOMBA TRADISONAL
EGRANG DI TARAKAN**

BACA HALAMAN 12



Kabut Asap kiriman, masyarakat diminta tetap waspada dan gunakan masker saat aktivitas di luar rumah.

Waspada ISPA, Masyarakat Diimbau Gunakan Masker

TANJUNG SELOR - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bulungan menilai, dampak dari kabut asap yang terjadi beberapa hari di Kabupaten Bulungan, berpengaruh pada kesehatan masyarakat.

Berupa gangguan Infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) meskipun, kondisi udara di Bulungan ter-

golong sedang, tapi ada pengaruh dari kabut asap serta kandungan debu. Hal ini, bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti batuk kering dan pilek.

“Kalau dari pantauan Dinkes Bulungan, sepekan terakhir mengalami peningkatan masyarakat yang mengeluh sakit ISPA,” ujar Kepa-

la Dinkes Bulungan, Imam Sujono, Rabu (4/10/2023).

Tren kasus tersebut, sambung dia, kecenderungan mengalami kenaikan. Hanya saja, belum ada pembuktian ilmiah yang membuktikan apakah itu disebabkan oleh kabut asap atau kandungan kualitas udara ataupun debu.

Tapi, informasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bulungan, bahwa udara di Bulungan ada kandungan debu. "Ciri-ciri orang terkena gangguan sakit ISPA itu beragam faktor penyebab. Bisa karena debu, suhu yang tidak stabil, kadangkala terlalu dingin atau bahkan terlalu panas. Juga faktor asap," tuturnya.

Dinkes Bulungan telah melakukan upaya mitigasi dengan telah mengirimkan surat imbauan pada pusat kesehatan masyarakat Puskesmas, dan Pustu, polides. Caranya dengan intenskan sosialisasi untuk mengu-

rangi aktivitas di luar rumah. Jika terpaksa, disarankan untuk menggunakan masker penutup mulut dan hidung.

"Kalau bisa gunakan masker jika terpaksa ke luar rumah. Ini, sebagai upaya mitigasi untuk mengurangi resiko," katanya.

Per Oktober 2023, masyarakat dengan gangguan ISPA di Bulungan meningkat. Sebagai antisipasi, pihaknya dalam waktu dekat bakal berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, utamanya berbicara faktor kesehatan anak.

"Karena anak sekolah ini merupa-

kan usia rentan. Mungkin ada imbauan, untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Kalau tidak salah, itu sudah diterapkan di Kalteng dan Kalbar," imbuhnya.

Tapi hal itu tidak langsung diterapkan, namun terlebih dahulu dilakukan analisa. Mengingat, kondisi udara di Bulungan statusnya sedang. Pasalnya, kabut asap yang terjadi di Bulungan, merupakan kiriman dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. (tin/and)

Editor: Andhika

Kualitas Udara Tanjung Selor dan Sekitarnya Masuk Kategori Sedang

TANJUNG SELOR - Bupati Bulungan Syarwani, imbau masyarakat Bulungan untuk tetap menjaga kondisi kesehatan. Mengingat, kondisi cuaca beberapa pekan terakhir di Bulungan tidak menentu, akibat kabut asap kiriman.

"Saya sudah sampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bulungan, khususnya Dinas Kesehatan supaya memperhatikan kondisi kesehatan anak-anak sekolah," ucap Syarwani, Rabu (4/10/2023).

Dia katakan, jika terpaksa keluar rumah pemerintah menyarankan untuk tetap menggunakan masker. "Karena potensi penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) sangat potensial di tengah kondisi kabut asap," ujarnya.

Kemudian, Syarwani mengajak serta imbau masyarakat Bulungan untuk sama-sama menjaga lingkungan sekitar, dengan tidak melakukan kegiatan atau aktivitas yang dapat mendukung bertambahnya kabut asap.

"Sama-sama kita menjaga wilayah Bulungan, supaya masyarakat tetap terlindungi, dan tetap dalam keadaan sehat," harapnya.

Pemerintah telah mengeluarkan imbauan bagi seluruh masyarakat Bulungan. Termasuk dengan sosialisasi melalui pusat kesehatan masyarakat. Isi imbauan tersebut, pada intinya meminta masyarakat tetap kedepankan upaya untuk melindungi kesehatan, kurangi aktivitas di luar rumah jika sifatnya tidak mendesak.

Sementara itu, Forcester BMKG Tanjung Harapan, Tanjung Selor, Sylvi saat dikonfirmasi menjelaskan, pada Rabu 4 Oktober 2023 wilayah Tanjung Selor terpantau kondisi kualitas udara dalam kategori sedang.

Bahwa informasi kualitas udara di wilayah Tanjung Selor dan sekitarnya, secara umum kondisi udara ambien di Tanjung Selor berada pada kondisi sedang. Konsentrasi maksimum yang tercatat adalah 33,9 mikrogram m³.

"Diharapkan kepada masyarakat, tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan selalu memakai masker ketika berada di luar ruangan," saran Sylvi.

Ia menambahkan, berdasarkan citra satelit terdeteksi adanya titik api hotspot di wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan beberapa wilayah di Kalimantan Timur, ditambah arah angin di dominasi dari arah teng-

gara dan selatan.

"Sehingga pergerakan polusi udara cenderung bergerak ke arah barat laut dan utara, wilayah Kalimantan Utara (Kaltara)," tuturnya.

Hal ini berdampak secara langsung terhadap perubahan kondisi kualitas udara di Tanjung Selor dan sekitarnya. (tin/and)

Editor: Andhika



Bupati Bulungan, Syarwani ajak masyarakat, kurangi aktivitas diluar rumah.



Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

Elita Minta Toko Tani Dibuka Kembali

TANJUNGREDEB - Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina meminta agar Toko Tani yang berada di Jalan Murjani II, Kelurahan Karang Ambun segera dibuka kembali.

“Padahal, beberapa waktu lalu Dinas Pangan sempat meresmikan Toko Tani itu,” katanya.

Oleh sebab itu, dia mendorong Pemkab Berau melalui OPD terkait dapat mengupayakan agar Toko Tani tersebut dapat dibuka kembali.

Hadirnya Toko Tani itu bertujuan untuk menekan harga di lapangan. Sayangnya, hingga saat ini manfaat

Toko Tani tersebut tidak dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Dengan adanya Toko Tani ini, harga menjadi sangat murah. Kemudian apa yang menjadi keluhan para petani seperti pupuk langka dan sebagainya bisa didapatkan,” ujarnya.

Politikus Golkar ini mengharapkan terobosan dari Pemkab Berau khususnya melalui Dinas Pangan ini dapat meringankan beban masyarakat dan petani di tengah mahalnnya harga-harga barang pertanian di lapangan.

“Terobosan-terobosan seperti

ini membuat para petani tidak lagi berkeluh kesah,” ucapnya.

Dirinya berharap, Toko Tani segera dibuka kembali agar bisa memenuhi kebutuhan para petani dengan harga yang lebih terjangkau.

“Termasuk pupuk, obat-obatan dan sebagainya. Kalau petani mudah untuk mendapatkannya, kan juga berkaitan dengan mendukung ketahanan pangan untuk meningkatkan produksi pertanian,” pungkasnya. (adv/and)

Jelang Akhir Tahun, Syarifatul Minta Pemkab Berau Evaluasi Kinerja OPD



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah

TANJUNG REDEB - Memasuki penghujung tahun 2023, Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia mengungkapkan, Pemkab Berau harus lebih memaksimalkan program-program pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan hidup orang banyak.

“Meskipun ada hal-hal yang masih kurang dan belum maksimal, harus lebih baik ke depannya, agar tercapai perlu adanya evaluasi,” katanya.

Dirinya juga meminta penegasan kepala daerah, agar setiap setiap OPD dapat dievaluasi. Sehingga, visi misi dan program kerja prioritas Bupati Berau dan Wakil Bupati Berau tidak terkendala.

“Jangan sampai, gara-gara itu, program pemerintah menjadi terkendala,” ujarnya.

Dia juga meminta, evaluasi para OPD yang memiliki kinerja buruk untuk dilakukan pembinaan. Karena OPD adalah ujung tombak merealisasikan program-program kepala daerah.

“Itu juga perlu dievaluasi. Apalagi, OPD yang tidak efisien dalam penyerapan anggaran,” pungkasnya. (adv/and)

Saga Dorong Rehab Kantor Kecamatan Gunung Tabur

TANJUNG REDEB - Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau gencarkan pembangunan kantor kecamatan di Gunung Tabur.

Menurut Saga, pembangunan ini dilakukan karena perlu adanya keselarasan antara dua kesultanan yang berada di Kecamatan Sambaliung dan Gunung Tabur.

Kesultanan Sambaliung telah dibangun kantor kecamatan dengan maksimal. Namun sebaliknya, yang berada di Gunung Tabur belum mendapat perhatian yang memadai.

“Di Sambaliung sudah dibangun cukup megah, dan kami minta agar Gunung Tabur mendapat hal yang sama,” kata Saga.

Dia mengungkapkan, Bupati Berau menginstruksikan instansi terkait memprioritaskan pembangunan kantor pelayanan masyarakat.

“Arahan dari bupati kepada dinas terkait yang membidangi, untuk memulai giat membangun kantor kecamatan,” bebernya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap, pembangunan kantor kecamatan bisa diprioritaskan. Sebab kepala daerah meminta pada 2024 sudah terlihat progresnya.

“Supaya ada pembangunan di tahun 2024 untuk kantor kecamatan. Kita minta ini jadi salah satu prioritas, sesuai arahan,” pungkasnya. (adv/and)



Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga



Anggota Komisi II DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto

Dedy Okto Tegaskan OPD Terkait untuk Perhatikan Kebersihan Destinasi Wisata

TANJUNG REDEB - Sektor pariwisata Kabupaten Berau diminta Anggota Komisi II DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto untuk dijaga dan dirawat. Khususnya dalam hal kebersihan.

Dia mengatakan, pada saat musim liburan, objek wisata Bumi Batiwakkal selalu dipadati wisatawan. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan yang ketat agar terhindar dari sampah.

“Menjaga lokasi wisata agar bebas sampah itu sudah menjadi sebuah keharusan. Saya harap para wisatawan yang berkunjung juga sadar akan kebersihan,” katanya.

Dirinya juga menyoroti tumpukan sampah yang ada di lokasi wisata saat musim liburan karena lonjakan

kunjungan wisatawan. “Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus perlu kerja ekstra, jangan sampai ada penumpukan sampah yang mengganggu keindahan wisata kita,” tuturnya.

Dia berharap, khususnya DLHK yang membidangnya, dapat mengkomodir petugas kebersihan. “Jangan sampai ada UPTD nya cuti semua. Harus dibuat secara bergiliran,” tegasnya.

Menurut Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini, sampah yang menumpuk memberi kesan yang tidak nyaman untuk wisatawan yang datang, terlebih jika menimbulkan bau tidak sedap.

“Saya harap di musim liburan nanti tempat wisata itu harus bersih dan

tidak jorok,” harapnya.

Dia juga mengimbau kepada pengunjung destinasi wisata yang ada di Berau untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

“Untuk menjaga objek wisata tetap bersih, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Dirinya menyebut, Pemerintah saat ini sudah berusaha secara maksimal menjaga kawasan objek wisata dengan menyediakan fasilitas tempat sampah maupun petugas kebersihan.

“Pemkab Berau telah menyediakan fasilitas tempat sampah dan petugas kebersihan. Itu sebagai upaya untuk menjaga kawasan objek wisata,” tandasnya. (adv/and)



Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo

Falentinus Ingatkan Pemerintah Komitmen dalam Peningkatan Sejumlah Sektor

TANJUNGREDEB - Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus komitmen dalam melakukan pembenahan serta peningkatan di sejumlah sektor. Seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Dia mengatakan, ketiga sektor itu harusnya mendapat perhatian lebih, mengingat mayoritas masyarakat di Berau menggantungkan hidupnya di sana.

"Kita punya anggaran yang tidak sedikit. Tiga sektor ini harus diutamakan. Karena, sektor-sektor itu menjadi penyangga pangan mas-

arakat Berau," ujarnya,

Menurutnya, terlalu banyak Silpa setiap tahun yang tidak terserap. Sehingga, tidak ada salahnya anggaran di sektor tersebut ditambah. Sebab, kata dia, akan percuma apabila berbicara peningkatan pertanian, perkebunan dan perikanan, sementara tidak didukung anggaran yang baik.

Dengan dukungan anggaran, maka akan membantu petani mengembangkan lahannya. Selain itu, nelayan di Berau juga mampu memperoleh hasil lebih melalui bantuan-bantuan yang diberikan.

"Saya kira ini bisa dimaksimalkan. Anggaran itu bukan punya kita, tapi

warga juga. Melalui program-program jangka panjang, diharapkan dapat membuat mereka memperoleh hasil produksi lebih," jelasnya.

Selain itu, OPD terkait, khususnya Dinas Pertanian dan Peternakan Hewan, Dinas Perkebunan, dan Dinas Perikanan Berau dapat melakukan pemetaan di setiap wilayah. Sebab menurutnya, dengan pemetaan tersebut maka program pro rakyat dapat diturunkan secara tepat dan terarah.

"Harapan kami, ketiga sektor ini ke depan dapat menjadi andalan Berau. Mengingat Berau juga menjadi penyangga IKN," pungkasnya. (adv/and)



Puluhan perahu dayung, menghiasi sungai Kayan Tanjung Selor.

Festival Sungai Kayan Dimeriahkan Puluhan Perahu Dayung

TANJUNG SELOR - Festival Sungai Kayan kembali digelar. Pelaksanaan Festival ini merupakan rangkaian agenda pemerintah daerah menyongsong hari jadi Tanjung Selor ke-233, dan Kabupaten Bulungan ke-63 tahun, pada 10 Oktober 2023.

Festival sungai kayan, dirangkai dengan beberapa kegiatan, salah satunya yaitu lomba perahu dayung, speed ketinting dan perahu hebob.

Bupati Bulungan Syarwani, didampingi Wakil Bupati, Ingkong Ala berterimakasih serta apresiasi atas kegiatan yang diselenggarakan. Festival sungai kayan, merupakan bagian daripada melestarikan budaya tradisional, meningkatkan pendapatan pelaku usaha juga sekaligus ajang hiburan kepada masyarakat.

Keberadaan Sungai Kayan, kata

Syarwani, menjadi bagian dari sejarah perjalanan serta kemajuan bumi Tenguyun -sebutan lain Kabupaten Bulungan.

“Selain itu, festival Sungai Kayan menjadi wujud kecintaan segenap unsur di Bulungan, dalam melestarikan segala kegiatan budaya. Sebagai warisan dari para leluhur untuk generasi muda khususnya di Bulungan,” ungkap Bupati Bulungan, Syarwani, Rabu (4/10/2023).

Di kesempatan yang sama, dirinya turut memberikan apresiasi terhadap masyarakat yang telah ambil bagian dalam mensukseskan acara Festival Sungai Kayan. Termasuk, masyarakat dari berbagai desa yang ikut serta dalam gelaran lomba perahu.

“Mari kita hindari perpecahan maupun pertengkar, junjung

tinggi persatuan dan kekompakan, karena itu modal utama kita dalam membangun Bulungan yang kita cintai,” harap Bupati.

Diingatkan pula, seluruh peserta lomba supaya tetap menjunjung tinggi sportifitas dan menjaga keselamatan.

Adapun, lomba festival sungai kayan dimeriahkan oleh perahu dayung kelas 20 putri, sebanyak 33 perahu. Kelas 40 putra, 47 perahu, kelas 30 putra 27 perahu, kelas 50 putra 2 perahu.

Kemudian, Ketinting 6,5 horse power-8 horse power underbond sebanyak 49 ketinting, 13 horse power -25 horse power underbond, sebanyak 19 ketinting, Hebob 5 speed. (tin/and)

Editor: Andhika



Bupati Bulungan Syarwani minta dukungan pemerintah Desa dalam mengembangkan peluang kelompok tani.

Desa Diminta Kontribusi Kembangkan Sektor Pertanian

TANJUNG SELOR - Pemerintah Kabupaten Bulungan, melihat peran penyuluh pertanian sangat strategis sebagai bagian daripada sistem pembangunan pertanian. Termasuk, pencapaian pada beberapa program yang berkaitan dengan aspek pertanian.

Bupati Bulungan, Syarwani menyampaikan, pemerintah daerah termasuk di dalamnya penyuluh pertanian dituntut untuk dapat membuka diri dan berdialog dengan petani.

Sehingga berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dapat ditanggapi serta direspon dengan tepat oleh pemerintah. Begitu pula, pemerintahan desa.

"Mereka diharapkan dapat mendukung, memberdayakan dan meningkatkan kapasitas petani," ungkap Syarwani, Rabu (4/10/2023).

Dia menerangkan, pemerintah

akan mendukung desa yang memberdayakan para petani dengan memanfaatkan dana desa. Seperti permodalan bagi para petani.

Kemudian, pemerintah daerah juga memiliki salah satu program prioritas berupa Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Mandau Tani). Program ini, berkaitan dengan peningkatan ketahanan pangan serta pertanian secara luas.

"Saya berharap, melalui pembinaan pelatihan dan rapat koordinasi dapat menghasilkan sebuah road-map atau peta jalan tahapan yang jelas, serta dapat dilakukan untuk pengembangan serta peningkatan pertanian di Bulungan," tuturnya.

Rapat koordinasi, kata Syarwani, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dan tenaga penyuluh pertanian. Kemudian untuk menyamakan persepsi, pandangan

dalam perencanaan pembangunan pertanian.

"Baik itu tingkat kelembagaan petani, penyuluh pertanian, dan organisasi perangkat daerah terkait," jelasnya.

Apalagi, program tersebut merupakan perencanaan yang bermuara pada pembangunan pertanian yang berkelanjutan, berdaulat pangan, maju dan sejahtera sesuai dengan visi dan misi pemkab Bulungan.

Diterangkan, peran penyuluh pertanian terhadap kemajuan petani, dengan memberikan pendampingan, bimbingan maupun pembelajaran.

"Harapannya, mereka mengetahui informasi terbaru dalam dunia pertanian, serta terus mengembangkan kelompok tani di wilayah masing-masing," tutupnya. (tin/and)

Editor: Andhika



HDCI Memulai Touring dari Perbatasan Indonesia, Dorong Pariwisata dan Investasi

MALINAU - Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki sejumlah daerah yang berbatasan dengan negara tetangga. Salah satu daerah yang mencolok adalah Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara (Kaltara), sebuah kabupaten yang sangat luas, bahkan lebih dari 50 persen luas Provinsi Kaltara.

"Touring dimulai dari perbatasan sudah kita mulai sejak Merdeka Ride bulan Agustus. Kita telah melakukan touring dari Kupang menuju Timor Leste. Sekarang kita mulai melakukan touring menuju Kalimantan Bike Week 2023. Kita memulainya dari Malinau, daerah paling ujung di Kaltara yang berdekatan dengan Malaysia," ucap Bro Husdy, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Harley-Davidson Club Indonesia (HDCI).

"Tujuan utama kami adalah membuka jalur touring baru, karena daerah yang menjadi tujuan touring dapat

memacu berbagai kegiatan ekonomi, dari penginapan, kuliner, hingga souvenir," sambungnya.

Hal ini lanjut Bro Husdy, dapat meningkatkan kegiatan UMKM di daerah tersebut. Selain itu, HDCI mengundang pengusaha atau investor touring untuk bergabung. "Kita berharap mereka dapat berinvestasi di daerah tujuan touring tersebut, sehingga terwujud pemerataan pembangunan, sesuai dengan program kerja HDCI tentang pariwisata dan UMKM," ucapnya.

Bro Husdy, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Harley-Davidson Club Indonesia (HDCI) (kiri) memberikan kenang-kenangan untuk Bupati Malinau.

Bupati Malinau, Wempi Wellem Mawa Bro Husdy, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Harley-Davidson Club Indonesia (HDCI)

Sementara itu, Pemkab Malinau

sangat mendukung inisiatif ini. Bupati Malinau, Bupati Malinau, Wempi Wellem Mawa, menyambut baik kedatangan para pengendara touring HDCI. Ia mengatakan bahwa dengan ramainya aktivitas touring di wilayah tersebut, ekonomi masyarakat setempat dapat berkembang pesat. "Ini juga akan mengundang klub motor lainnya untuk datang," kata Bupati.

Pada kesempatan yang sama, HDCI juga memberikan bantuan paket beras kepada warga Malinau yang diterima langsung oleh Bupati. Esok harinya, peserta touring yang terdiri dari 25 motor anggota HDCI dari Jakarta dilepas Bupati Malinau di depan kantor bupati, dengan tujuan akhir kota Banjarmasin, dengan jarak tempuh mencapai lebih dari 1540 km. (MK)

Editor: Agus Susanto



Bupati KTT Ibrahim Ali Hadiri rakornas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, di Jakarta.

Dorong Percepatan Digitalisasi Demi Terciptanya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

TANA TIDUNG – Bupati KTT, Ibrahim Ali menghadiri rapat koordinasi nasional percepatan dan perluasan digitalisasi daerah tahun 2023. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (3/10/2023) kemarin.

Kegiatan ini bertajuk, Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah, untuk Indonesia Maju. Yang dibuka langsung oleh wakil presiden RI, Ma'ruf Amin.

Pelaksanaan percepatan digitalisasi di daerah, kata Ibrahim, merupakan tindak lanjut dari amanat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021, tentang Satuan Tugas Percepatan dan

Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).

“Agenda rakornas P2DD ini, bertujuan untuk percepatan penerapan sistem digitalisasi di daerah. Percepatan digitalisasi yang dimaksudkan, baik dari sisi realisasi penerimaan maupun pengeluaran anggaran yang dikelola di masing-masing daerah,” ungkapnya.

Sistem digitalisasi, pada tujuannya untuk meningkatkan transparansi keuangan, serta mempermudah para kepala daerah serta stakeholder dalam pengambilan keputusan.

“Saya mengimbau kepada semua jajaran, khususnya OPD di Lingkung-

gan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung secara bersama, berkolaborasi untuk melakukan langkah percepatan untuk menerapkan sistem digitalisasi di daerah kita,” tuturnya.

Disamping itu, juga diharapkan melalui rakornas P2DD Tahun 2023, bisa dijadikan momentum strategis bagi pemerintah daerah dalam menekan inflasi dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. “Utamanya di Kabupaten Tana Tidung yang kita cintai,” pungkasnya. (tin/and)

Editor: Andhika



ADE/MKR

Puluhan siswa SMP saat mengikuti lomba Egrang di Tarakan.

Puluhan Siswa SMP Ikuti Lomba Tradisional Egrang di Tarakan

TARAKAN - Puluhan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari 18 sekolah negeri maupun swasta mengikuti lomba tradisional Egrang di Tarakan. Perlombaan ini digelar di Stadion Datu Adil, Jalan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, Rabu (4/10/2023).

Koordinator Egrang, Ridwan menjelaskan, perlombaan ini dilaksanakan mulai tanggal 4 hingga 8 Oktober 2023. "Jadi untuk tanggal 4, 5 dan 6 seleksi. Tanggal 8 finalnya di Taman Berlabuh," katanya.

Kata Ridwan, perlombaan ini merupakan rangkaian dari Festival Iraw Tenggayu XII yang diadakan Pemerintah Kota Tarakan bersama Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Kormi).

"Yang ikut ada sekitar 18 sekolah. Jadi sebenarnya total keseluruhan ada 28 sekolah, 14 negeri dan 14 swasta itu yang kita undang. Setiap sekolah itu maksimal masing-masing ikutkan 5 putra dan 5 putri. Namun, ada yang berhalangan karena ada yg tidak bisa main," terangnya.

Dalam perlombaan ini, nantinya akan terpilih 5 juara masing-masing untuk putri dan putra. Dia berharap dengan perlombaan Egrang, budaya permainan olahraga tradisional dapat tetap terjaga.

Selain itu, diharapkan masyarakat khususnya anak-anak tetap mengenal permainan Egrang di tengah kemajuan teknologi seperti saat ini. "Kita berharap ini menjadi agenda tahunan. Kami juga usahkan

sekolah membudayakan olahraga ini. Jadi tiap sekolah punya alat egrang. Kemudian melakukan pembinaan kepada siswanya. Sehingga olahraga ini berkembang. Semoga di sekolah bisa jadi ekstrakurikuler," imbuhnya.

Untuk diketahui, dalam rangkaian Festival Iraw Tenggayu XII, Pemerintah Kota Tarakan berkolaborasi dengan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Kormi) Tarakan mengadakan 7 lomba tradisional.

Adapun olahraga tradisional itu meliputi Panahan, Tarik Tambang, Hadang, Layang-layang hias, Gas-ing, Egrang dan Domino. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika



Foto bersama Norhayati Andris bersama Ketua DPD Gerindra Provinsi Kaltara Ibnu Saud, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltara, Jufri Budiman dan jajaran pengurus lainnya.

ADE/MKR

Norhayati Andris Resmi Pindah Partai dari PDIP ke Gerindra

TARAKAN- Norhayati Andris memutuskan pindah ke Partai Gerindra setelah 20 tahun berkarir di PDIP. Keputusan tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers, Rabu (4/10/2023) siang tadi di kediamannya Jalan Celebes, Kelurahan Karang Anyar, Kota Tarakan.

Mantan Ketua DPRD Kalimantan Utara ini mengatakan, jauh sebelum memilih Gerindra sebagai perahubarunya, sejumlah partai lain sempat menawarinya untuk bergabung, diantaranya PKB, Golkar, Nasdem, dan Demokrat. Namun ia lebih memilih partai Gerindra karena melihat bahwa 2024 adalah tahunnya Gerindra.

"Saya melihat bahwa tahun ke depan adalah tahunnya Gerindra. Saya yakin bahwa Pak Prabowo akan memimpin Indonesia melanjutkan program Pak Jokowi. Dasar saya berpindah bukan sakit hati, tetapi karena kita di parpol tidak ada zona nyaman karena ini persaingan namun tentu ini persaingan yang sehat," ujarnya.

Setelah tak lagi masuk dalam struktur partai PDIP, Norhayati

tak menampik bahwa ia sudah lama menunggu kejelasan dari PDIP terkait penugasan partai untuknya di Pemilu 2024. Kurang lebih 1,5 tahun ia menunggu tugas tersebut, namun PDIP belum juga memberi kepastian. Hal inilah yang menjadi pemicu ia berlabuh ke Partai Gerindra.

"Hari ini terang benderang saya memilih ke Gerindra bukan sesuatu mudah dan bukan juga karena kecewa langsung pindah partai, tidak. Saya menunggu 1,5 tahun kejelasan PDIP memberikan saya penugasan. Saya harus punya sikap dan bersiap melangkah melanjutkan perjalanan politik saya dan last minute menghubungi Gerindra, ketemu dan saya memutuskan ikut bergabung ke Gerindra. Bukan pada saat kecewa sakit hati. Saya setia. Tapi, menunggu detik terakhir penugasan tapi saya belum dikasih kesempatan," tegasnya.

Karena tak kunjung mendapat kepastian itu, ia mengambil langkah untuk hijrah ke Partai Gerindra. Norhayati tak ingin melewatkan pemilu 2024 dengan hanya menjadi penon-

ton. Katanya, ia ingin ikut menjadi peserta di dalam pesta demokrasi.

"Sehingga hari ini saya bukan lagi PDIP tapi pemilu 2024 saya pindah ke Gerindra. Siapapun mengenal saya memilih di PDIP, kawan saudara handai taulan yang memilih saya, sekarang kita sudah di rumah baru di Gerindra. Kita berjuang di Partai Gerindra," ucapnya.

Dalam kesempatan ini pun, Norhayati Andris sekaligus menjawab mengenai status keanggotaannya di DPRD Kaltara, dimana saat ini ia duduk di kursi DPRD Kaltara membawa nama PDIP. "Status di DPRD. Sampai hari ini saya sudah mengajukan pengunduran diri. Saya masih bisa beraktivitas sebelum pengganti saya dilantik," lanjutnya.

Setelah pindah dari PDIP ke partai Gerindra, diketahui Norhayati terdaftar sebagai Bakal Calon Legislatif Dapil I Kalimantan Utara pada pemilu 2024. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



Pesta Budaya
MARIJUKI-2023 YLUND SELORANKE-03 KABUPATEN BULUNGAN
SEPTEMBER - OKTOBER 2023

MEMBANGUN SDM YANG UNGGUL,
MENUJU BULUNGAN BISA, MAJU DAN SEJAHTERA

Lomba Musik Daerah /Traditional, Tingkat Pelajar - Karnaval Baju Adat dan aksesoris - Lomba Menyanyi
Laga Daerah - Lomba Kondewaan Hias Etnik Daerah - Lomba Tari Pelair dan Pedalaman
Lomba Menyempit - Lomba Olahraga Tradisional - Festival Sungai Kayan

fb @bulungankab | @pesta.kab.bulungan | Citra Bencauta | http://www.bulungan.go.id



**KELUARGA BESAR KODIM 0902/BERAU
BESERTA PERSTIT KCK CAB XV DIM 0902 BERAU**

DIRGAHAYU TNI
5 OKTOBER 1945 - 5 OKTOBER 2023
TNI PATRIOT NKRI
PENGAHAL DEMOKRASI UNTUK INDONESIA MAJU

KODIM 0902/BERAU



**KELUARGA BESAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BERAU**

mengucapkan :

DIRGAHAYU TNI
5 OKTOBER 1945 - 5 OKTOBER 2023
TNI PATRIOT NKRI
PENGAHAL DEMOKRASI UNTUK INDONESIA MAJU

H. ANANG SAPRANI, SH. MSi.
Kepala Satpol PP Kabupaten Berau

